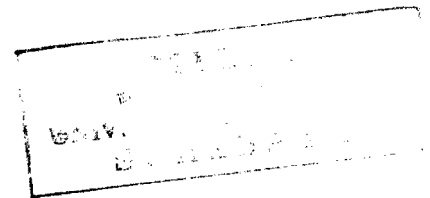


Revisi
800
P

SKRIPSI

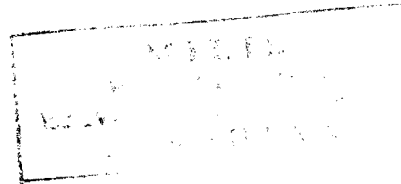
PURNA SUSANTI

**PERLINDUNGAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**PERLINDUNGAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA STRATA SATU BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Lanny Ramli, S.H., M.H.
NIP. 131 878 388

Penyusun,

Purna Susanti
NIM. 039313850

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Machsoen Ali, S.H., M.S.



Anggota : 1. R. Indarsoro, S.H.

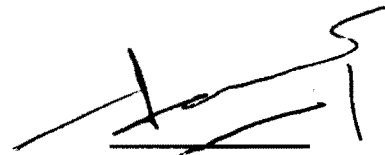
2. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



3. Sumardji, S.H., M.Hum.



4. Lanny Ramli, S.H., M.H.



BAB IV

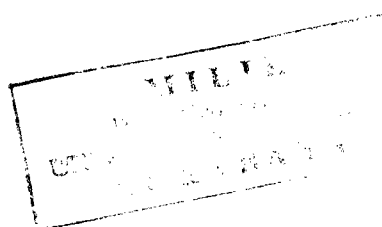
PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan upah bagi Anak Buah Kapal di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengharuskan setiap Anak Buah Kapal diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) di hadapan syahbandar/pejabat yang berwenang. Dalam PKL tersebut wajib dicantumkan berapa besarnya upah tiap bulan yang akan diterima oleh Anak Buah Kapal atau bagaimana cara menctapkan upah bilamana upah tersebut bukanlah upah bulanan. Kendala terbesar dalam pelaksanaan perlindungan upah ini adalah lemahnya pengawasan terhadap kinerja instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah syahbandar yang memungkinkan terjadinya pembayaran upah dibawah standard kebutuhan fisik minimum.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin pelaksanaan jaminan sosial bagi para Anak Buah Kapal adalah kemauan semua pihak yang terkait yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah untuk bersama-sama memahami posisi masing-masing dan juga tidak lupa untuk mengerti kedudukan pihak lain.

2. Saran

1. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan harus segera dilaksanakan agar pekerja mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya; pengusaha agar sadar bahwa mereka mempekerjakan manusia, bukannya mesin dan sudah sewajarnya jika memberikan penghargaan yang layak kepada mereka; pemerintah lebih memberikan perhatian mengenai pelaksanaan peraturan yang ada, bahkan jikalau memungkinkan mengeluarkan suatu peraturan baru yang sejalan dengan peraturan-peraturan lain (konsisten) yang lebih memberikan perlindungan kepada para Anak Buah Kapal, khususnya dalam hal pengupahan. Dalam mengeluarkan suatu peraturan, pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan suatu peraturan yang melindungi kepentingan ataupun memberi perlindungan kepada pekerja dan juga majikan sehingga masing-masing pihak yang terkait dapat terlindungi dan dapat melaksanakan kewajibannya semaksimal mungkin.
2. Upaya-upaya yang sebaiknya ditempuh pada saat ini adalah peninjauan kembali substansi peraturan perundang-undangan yang menyangkut jaminan sosial, khususnya jikalau dikaitkan dengan keberadaan Anak Buah Kapal. Pemerintah hendaknya dapat lebih memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih belum diterapkan pada berbagai perusahaan



pelayaran rakyat (PELRA) yang mengakibatkan kurang adanya jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan hari tua bagi para Anak Buah Kapal.